

Pelatihan Akuntansi Untuk Mendukung Pengelolaan Dana Desa Yang Transparan Dan Akuntabel Pada Desa Corowali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

Hasliah¹, Bakri², Nurhaedah³, A.Muh Anzhari⁴, Muhammad Isra'Chika Arfah⁵
A Muh Sofian Assuary⁶, Arhanuddin⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi- LPI

Abstrak

Tujuan Pengabdian Kepada masyarakat yang dilakukan untuk memahami dan mengevaluasi pelatihan akuntansi dalam pengelolaan keuangan dana sdesa yang transparan dan akuntabel pada desa Corowali Kabupaten Tanete Rilau Kabupaten Barru . Metode yang dilakukan dalam PKM ini ceramah dalam bentuk pelatihan atau sosialissai, tanya jawab, diskusi dan simulasi dari hasil kegiatan yang dilakukan.

Hasil dan pembahasan PKM ini, dengan melakukan PKM ini pemerintah desa Corowali Kabupaten Tanete Rilau Kabupaten Barru ini dapat memahami pelatihan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Selain dibekali adanya pelatihan akuntansi maka Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance). Hal ini menandakan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik harus mengandung prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Desa. Sehingga diadakannya pengelolaan keuangan desa dimaksudkan agar pengelolaan keuangan masyarakat yang dipegang oleh pemerintah desa dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya akuntabilitas didalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : Pelatihan akuntansi, Pengelolaan Dana desa

Abstract

The purpose of Community Service is to understand and evaluate accounting training in transparent and accountable village fund financial management in Corowali Village, Tanete Rilau Regency, Barru Regency. The method used in this PKM is a lecture in the form of training or socialization, questions and answers, discussions and simulations of the results of the activities carried out. The results and discussion of this PKM, by conducting this PKM, the Corowali Village Government, Tanete Rilau Regency, Barru Regency can understand accounting training in village fund management. In addition to being equipped with accounting training, the Village Government must be able to apply the principle of accountability in village financial management, where all village government activities must be accountable to the village community in accordance with the provisions so that good village governance is realized. This indicates that good village governance must contain transparent, accountable, and participatory principles as stated in the Village Law. So that the holding of village financial management is intended so that the management of community finances held by the village government is carried out transparently both from the preparation process to accountability so that accountability will be created in its management. Effective and efficient financial management is one form of good governance.

Keywords: Accounting Training, Village Fund Management

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir (Sara et al., 2019). Pemberian dana yang cukup besar melalui dana desa mengundang asumsi negatif banyak kalangan praktisi, akademisi dan politisi (Anggiriawan dkk., 2018). Pandangan tersebut mengarahkan argumentasi dalam JPIK E ISSN 2987-5986, yang mengarah inovasi dan kerlanjutan bahwa desa-desa tertentu, yang belum terbentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik, akan mengalami disorientasi pelaksanaan pemerintahan, jika tidak dipersiapkan kematangan sumberdaya manusia dan institusi kelembagaan (Dewi dkk., 2017).

Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan menjadi isu utama dalam pemerintahan desa (Sara & Saputra, 2021a). Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakatdesa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance) (Sujana et al., 2020). Hal ini menandakan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik harus mengandung prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Desa (Atmadja & Saputra, 2017)

Berdasarkan pengalaman dan pendataan yang dilakukan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa di Indonesia masih belum memadai untuk menyelenggarakan pelaporan yang baik dan benar (Anggiriawan dkk., 2018). Padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dana desa yang berasal dari APBN mencapai 10% dari dana transfer daerah atau sekitar Rp.68-70 triliun. Para aparat desa sebagai kuasa pengguna anggaran nantinya akan diaudit oleh BPK. Dari pengalaman pengucuran dana APBD ke institusi Desa, masih banyak terjadi penyelewengan dan mereka bisa terkena konsekuensi hukum (Saputra dkk., 2018).Nantinya kementerian DPDTT (Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) bekerjasama dengan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) membuat guidanceagar pelaporan para aparat desa bisa sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku (Rustiarini, 2016). Hal tersebut masih perlu didiskusikan lagi karena di seluruh Indonesia ada lebih dari 73 ribu desa membutuhkan pelatihan dari praktisi atau akademisi akuntansi dalam hal penyusunan maupun pelaporan yang bersifat transparan dan akuntabel (Saputra dkk., 2019).Para akademisi dan praktisi akuntansi dapat bekerjasama dengan aparat desa dalam hal pelaporan keuangan yang mengandung unsure transparansi dan akuntabilitas (Rasul, 2009). Dengan adanya kerjasama ini diaharapkan kesiapan para perangkat desa untuk mendapat bimbingan agar bisa membuat pelaporan dana desa sesuai dengan standar yang nantinya akan diberlakukan (Saputra, 2015)

Pelaporan dana desa ini sangat penting dan tidak hanya untuk mencatat dan melaporkan dana desa, tetapi juga dana-dana dan asset lainnya, seperti bengkok (tanah inventaris yang diperuntukkan bagi kepala desa) ataupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain dengan adanya pelatihan akuntansi dalam pemerintahan desa maka dalam pelaporan dana desa akan berjalan secara efektif dan efisien selain itu pelaporan desa yang dibuat dan dilaksanakan secara terperinci secara transparan dan akuntabel untuk menghindari terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk sosialisasi berupa pelatihan akuntansi desa kepada para aparatur/staf pemerintah desa Corowali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Kegiatan pelatihan ini sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi, dan olehnya itu kegiatan ini perlu dikembangkan yang selanjutnya dapat diterapkan sehingga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun luaran yang ditargetkan sebagai solusi yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan pemahaman para peserta terhadap pentingnya peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa, sekaligus tersedianya laporan keuangan sebagai output untuk pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. (2) Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan para peserta dalam menyusun laporan keuangan pemerintah desa

METODE

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Desa Corowali kecamatan Tanete Kabupaten Barru dalam bidang akuntansi, agar mitra memahami dan mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, dan simulasi dengan menampilkan contoh-contoh bentuk transaksi dan laporan keuangan desa, yang dilanjutkan dengan praktik mengerjakan soal latihan oleh para peserta;

- 1) Metode ceramah dalam kegiatan ini merupakan pilihan metode pengajaran dengan cara Pelatihan Akuntansi Desa Bagi Para Aparatur Pemerintah Desa Corowali penyampaian pengetahuan secara lisan kepada para peserta. Pilihan metode ini karena dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling efektif dalam penyampaian suatu informasi guna membantu pemahaman peserta, dan merupakan cara mengajar atau penyajian materi melalui penuturan lisan, gaya bahasa, sikap, serta kelancaran berbicara oleh pemateri.
- 2) Metode diskusi juga digunakan sebagai pilihan dalam pelaksanaan kegiatan ini agar para peserta/partisipan secara bersama-sama bertukar pendapat tentang suatu isu, dan untuk mencari jawaban atas masalah tertentu berdasarkan fakta, pengetahuan, dan ide yang dimilikinya. Metode ini dianggap sangat efektif karena melibatkan para pemateri maupun peserta untuk mencari solusi pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Metode ini akan berjalan secara baik dan produktif jika para partisipan memperhatikan gagasan yang disampaikan oleh orang lain, dan berpikiran terbuka, menghormati dan menerima kontribusi orang lain, tidak mudah tersinggung ketika kelompok lain tidak menerima ide/saran yang diutarakan.
- 3) Metode tanya jawab digunakan dalam kegiatan pelatihan ini merupakan cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab terutama dari pemateri kepada para peserta, atau sebaliknya pula dari peserta kepada kepada pemateri. Metode ini digunakan untuk menciptakan suasana aktif, menggali dan merumuskan ideide peserta, mengecek pemahaman para peserta, dan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk berkomentar.
- 4).Metode simulasi dalam kegiatan ini merupakan pelengkap teknik duplikat yang mendekati kondisi riil pada sebuah pekerjaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap yang dilakukan dengan adanya penentuan khayalak sasaran. Sasaran dari kegiatan ini berfokus pada para aparatur desa Corowali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Pemilihan khalayak sasaran dinilai berdasarkan permasalahan terkait keuangan desa dan cara pertanggungjawabannya. Dalam hal ini, tim PkM melakukan koordinasi langsung dengan pimpinan kecamatan Leitimur Selatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian terkait akuntansi desa bagi para aparatur pemerintah desa Corowali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Selanjutnya, penentuan waktu pelaksanaan

kegiatan dirumuskan bersama para partisipan untuk mengatur kesesuaian waktu peserta pelatihan dengan tim pelaksana. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Akuntansi Bagi Aparatur Pemerintah Desa :



Gambar Tim Pengabdi Dan Mitra Desa Corowali

Pada tahap penyusunan materi pelatihan, tim pengabdian menyusun materi terkait pelatihan akuntansi desa. Materi-materi ajar tersebut selanjutnya disampaikan saat tahap pelaksanaan untuk sesi penyampaian materi. Untuk pelaksanaan praktik pelatihan, serta mengingat fokus peserta pelatihan adalah para aparatur negeri Pelatihan Akuntansi Desa Bagi Para Aparatur Pemerintah Desa Corowali Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru maka materi-materi ajar tersebut didesain bersifat standar sehingga mampu memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dikuasai oleh aparatur negeri dalam melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan peningkatan pengetahuan akuntansi, para aparatur desa akan diberikan materi pelatihan yang memuat tentang

- 1) konsep dasar akuntansi,
- 2) akuntansi dan kode akun,
- 3) siklus akuntansi,
- 4) bukti transaksi,
- 5) buku besar,
- 6) penyusunan laporan keuangan, dan
- 7) pengelolaan keuangan desa.

Selain dibekali adanya pelatihan akuntansi maka Pemerintahdesa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance). Hal ini menandakan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik harus mengandung prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Desa.

Sehingga diadakannya pengelolaan keuangan desa dimaksudkan agar pengelolaan keuangan masyarakat yang dipegang oleh pemerintah desa dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya akuntabilitas didalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN

Dengan adanya pelatihan akuntansi pada Desa Corowali Kecamatan Tanete rilau Kabupaten maka pemerintah desa lebih memahami dan mengevaluasi dalam pengelolaan keuangan dana desa . Selain dibekali adanya pelatihan akuntansi maka Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance). Hal ini menandakan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik harus mengandung prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Desa. Sehingga diadakannya pengelolaan keuangan desa dimaksudkan agar pengelolaan keuangan masyarakat yang dipegang oleh pemerintah desa dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya akuntabilitas didalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggiriawan, P. B., Saputra, K. A. K., & Sanjaya, I. K. P. W. (2018). Prinsip Dualitas Dan Akuntansi Sumber Daya Manusia Dalam Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(September), 1–14.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16
- Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. A. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 129–147
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 21(3), 538–553. <https://doi.org/10.22146/jmh.16276>
- Saputra, K.A.K. (2021). the Effect of Sound Governance and Public Finance Management on the Performance of Local Governments. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences (RJOAS)*, 10(118), 32–43. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-10.04>